

BIAYA PENGOBATAN DITANGGUNG PEMDA

Dewan Sambangi Korban Keracunan Massal

SLEMAN (KR) - DPRD Sleman menyambangi langsung korban keracunan massal di posko penanganan di Tempel. Sedangkan untuk biaya pengobatan di rumah sakit akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman HR Sukaptana SH mengatakan, pihaknya bersama beberapa stake holder mengecek langsung pasien yang menjadi korban keracunan massal. Selain itu juga mengecek pembuatan makanan yang menyajikan untuk hajat. "Kami tadi bersama beberapa pihak sudah mengunjungi langsung korban dan lokasi pembuatan makanan," katanya. Untuk posko, lanjut Sukaptano, yang seharusnya

hanya 24 jam akan diperpanjang. Mengingat posko itu untuk mempermudah layanan bagi korban keracunan makanan. "Kebetulan posko itu juga dekat dengan klinik. Jadi posko itu didirikan untuk mempermudah penanganan korban," ujarnya.

Sementara untuk biaya pengobatan, akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Baik korban yang sudah menjalani rawat jalan maupun yang masih rawat inap. "Semua akan ditanggung oleh pemerin-

tah daerah. Bagi yang sudah membayar sendiri, nanti bisa diganti oleh pemerintah daerah," terang Sukaptano.

Kunjungan ke korban keracunan massal juga dilakukan Anggota Komisi D DPRD Sleman dr Raudi Akmal. Pihaknya meminta kepada dinas kesehatan supaya *response time* yang lebih cepat lagi dan bisa segera melaporkan penyebab keracunan. Kemudian memastikan korban tidak ada yang parah dan bisa proses penyembuhan yang ideal serta cepat. "Kami berharap para korban ini bisa segera sembuh. Kemudian penyebab keracunan dapat segera diketahui," ujarnya. (Sni)-d



Korban keracunan makanan saat dirawat di posko penanganan.

KR-Istimewa

PILAR UTAMA PEREKONOMIAN DAERAH

Wabup Ingatkan Pentingnya Pemberdayaan UMKM



KR-Istimewa

Wabup Danang Maharsa memperlihatkan kaos UMKM Bergerak.

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Danang Maharsa menekankan pentingnya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian daerah. Mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian Sleman dan merupakan penyelamat perekonomian Indonesia yang menjadi pembangkit ekonomi masyarakat.

"Kegiatan silaturahmi yang diinisiasi Bahana UMKM Bergerak ini

bertujuan memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui pendampingan, akses pembiayaan, serta penguatan jaringan pemasaran. Selain itu juga dapat menambah wawasan dan ilmu bagi pelaku UMKM dan 8 pilar ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Sleman sekaligus meningkatkan kapasitas," ungkap Danang saat menghadiri Silaturahmi Oktapreneur di Kantor Kelurahan Sido-rejo Godean, Senin (10/2). Acara yang berkolaborasi

dengan Bahana UMKM Bergerak dengan menghadirkan perwakilan 8 pilar ekonomi dan lingkungan yakni dari UMKM, Pokdarwis, Desa Wisata, Desa Budaya, Gapoktan, KWT, WKS-BM, dan Pegiat Sampah.

Menurut Danang, kegiatan ini bisa menambah wawasan dan ilmu menjadikan forkom UMKM dan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman meningkat. "Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa se-

tiap pelaku usaha mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, baik dari segi pelatihan, akses modal, maupun pemasaran digital," tambahnya.

Sementara Pendiri Bahana UMKM Bergerak Tetra Budiarto mengatakan, kegiatan ini berawal dari Pameran Potensi Daerah (PPD) di Lapangan Danggung yang bentuk kegiatannya berupa podcast. Dari situ disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami pelaku UMKM yaitu produk, perizinan, permodalan, dan pemasaran. Oleh karenanya kegiatan silaturahmi ini adalah salah satu program dan sarana bagi pelaku UMKM untuk menemukan solusi.

"Dari hasil evaluasi terkait permasalahan yang dialami pelaku UMKM dalam podcast tersebut, diadakan kegiatan Ngaji UMKM yang berencana dilaksanakan di bulan April atau Mei dengan 86 kalurahan. Kegiatan tersebut rencananya dilakukan setiap minggu satu kali yang selesai dua tahun kurang satu bulan," kata Tetra. (Has)-d

Polda Gelar Operasi Keselamatan Progo

SLEMAN (KR) - Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Yuswanto Ardi mengajak masyarakat untuk meningkatkan ketaatan dan kesadaran berlalu lintas. Mengingat, kecelakaan lalu lintas sering kali diawali dengan adanya pelanggaran.

Salah satu pelanggaran yang disoroti adalah tidak memakai helm, dengan alasan perjalanan yang ditempuh tidak terlalu jauh. "Bukan jarak tempuh yang harusnya diukur, namun jarak kepala dengan aspal yang kita antisipasi bersama untuk meminimalisir fatalitas jika terjadi kecelakaan," ujar Yuswanto usai apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Progo 2025 di halaman Polda DIY, Senin (10/2).

Dijelaskan, operasi digelar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Mengingat, aspek keamanan dan keselamatan masih sering diabaikan oleh pengguna jalan. Dengan didukung oleh stake-

holder terkait, diharapkan langkah-langkah Kepolisian tersebut dilakukan demi keselamatan bagi diri pengguna jalan maupun pengguna jalan lainnya.

Operasi dilaksanakan selama 14 hari berturut-turut yakni mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 1.470 personel meliputi 283 personel dari Polda DIY dan didukung oleh polres dan polresta jajaran sebanyak 1.187 personel.

Dirlantas menjelaskan, konsep operasi mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, serta penegakan hukum baik secara elektronik maupun teguran simpatik. "Meskipun kami mengedepankan penindakan bersifat persuasif berbentuk teguran simpatik, namun pada kriteria pelanggaran tertentu yang sangat berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, akan kita lakukan penilangan," ujar Yuswanto. (Ayu)-d



KR- Dok Humas Polda DIY.

Sejumlah personel yang terlibat dalam Operasi Keselamatan Progo 2025.



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

Meningkatkan Persentase Anggaran Pembangunan SDM



KR-Istimewa

Guntur Yoga Pumawan ST

SLEMAN (KR) - Komisi A DPRD Kabupaten Sleman akan terus mendorong eksekutif untuk meningkatkan persentase pembangunan non fisik atau Sumber Daya Manusia (SDM). Hal itu sebagai bentuk untuk menyongsong Indonesia emas pada Tahun 2045 mendatang dalam menyiapkan SDM unggul.

Ketua Komisi A DPRD Sleman Guntur Yoga Pumawan ST mengatakan, dalam pembangunan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata. Namun pembangunan non fisik juga perlu diperhatikan.

"Pembangunan infrastruktur (fisik) itu memang penting. Namun peningkatan kapasitas SDM, pelatihan, pemberdayaan dan lainnya juga tak kalah penting," katanya, Senin (10/2).

Guntur mendorong kepada pemerintah daerah untuk terus meningkatkan persentase pembangunan SDM ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya untuk menyiapkan SDM yang unggul dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 mendatang.

"Kami menginginkan, persentase anggaran untuk pelatihan dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat Tahun 2025 ini lebih tinggi dari tahun kemarin. Bahkan kalau bisa setiap tahunnya selalu ada peningkatan anggaran," ucap politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Kenapa itu penting, lanjut Guntur, pembangunan non fisik ini juga bagian untuk lebih memajukan Kabupaten Sleman. Termasuk di dalamnya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sleman. "Tujuan akhir pembangunan

fisik dan non fisik itu sama, yakni bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar mantan Lurah Jogotirto Berbah tiga periode ini.

Dengan era sekarang ini, mempersiapkan SDM yang unggul cukuplah penting. Harapannya masyarakat Sleman mampu bersaing di era gemuruh perdagangan bebas. "Penguatan keterampilan harus dilakukan sejak sekarang. Kami ingin masyarakat Sleman ini mampu bersaing di era digital," terangnya.

Untuk mendukung penguatan keterampilan, Komisi A DPRD Sleman meminta program penguatan kapasitas seperti pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat terus ditingkatkan anggarannya.

Dengan harapan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat program tersebut.

"Kami selalu legislatif berharap anggaran untuk pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat supaya terus ditingkatkan. Semakin banyak program

yang dilaksanakan, akan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaatnya," kata Guntur.

Pelatihan dan pembinaan itu dapat dilakukan terhadap kelompok-kelompok tani, peternak, karangtaruna. Selain itu juga bisa Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK, kelompok UMKM dan lainnya. "Bagaimana memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dari agar lebih berdaya. Harapannya kelompok masyarakat lebih maju dan berkembang,"

tutumya.

Dengan keterampilan tersebut, diharapkan masyarakat mampu membuka peluang usaha. Selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja sehingga nantinya mampu mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman. "Jika memiliki keterampilan, masyarakat dapat bekerja atau membuka usaha baru. Dengan keterampilan yang dimiliki itu, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Hal senada dikatakan Anggota Komisi A DPRD Sleman Yani Fathurrahman SPdI. Menurutnya, selama ini persepsi masyarakat terhadap pembangunan identik dengan pembangunan fisik perlu diubah. Pembangunan non fisik atau SDM juga perlu digalakkan tanpa mengesampingkan pembangunan fisik. "Pembangunan itu tidak hanya semata-mata harus fisik saja. Tapi pembangunan SDM juga tak kalah pentingnya," ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sleman.



KR-Istimewa

Yani Fathurrahman SPdI

Dikatakan Yani, APBD Sleman itu sekitar Rp 3 triliun. Seharusnya Pemkab Sleman menyiapkan pembangunan manusia seperti adanya beasiswa bagi pelajar Sleman yang ingin belajar di luar negeri. Tujuannya warga Sleman, khususnya warga tak mampu dan berprestasi. "Jadi pembangunan manusia itu juga perlu inovasi. Salah satunya memberikan beasiswa ke luar negeri bagi warga Sleman. Setelah mengenyam pendidikan di luar negeri, dapat membangun Sleman agar lebih maju," sambung warga Wukirsari Cangkringan ini. (Sni)-d



KR-Saifulah Nur Ichwan

Guntur saat memimpin rapat Komisi A DPRD Kabupaten Sleman.